

REVITALISASI BUDAYA *SIRIK BUTTA* DALAM PEMBINAAN PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN DI SULAWESI

Andi Aprasing, Ika Novitasari
Universitas Sulawesi Barat
Email: aprasing@unsulbar.ac.id

Abstrak

Masyarakat Sulawesi Selatan secara sosio-kultural terdiri dari empat etnik, yaitu: Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja. Mereka menganut suatu konsep budaya yang disebut *sirik*. Konsep ini mengandung arti dan makna, kehormatan, martabat dan harga diri, yang dijaga dan dipertahankan, dengan mengorbankan jiwa sekalipun. Karena itu segala sikap dan perilaku secara kultural berlandaskan pada upaya menjaga dan memelihara *sirik*. Dalam kehidupan pemerintahan dikenal konsep *sirik butta*, yaitu memelihara martabat dan kehormatan bangsa. Sikap dan perilaku utama yang mengawal *sirik* ini adalah kejujuran (*lambusuk*), kecakapan (*caraddek*) dan keberanian (*barani*). Secara formal pada abad 16 di Sulawesi Selatan, *sirik* ini pernah menjadi standar dalam praktek birokrasi kerajaan. Ini terdapat pada penjelasan *lontarak* (tulisan sejarah dengan huruf *lontarak*-Makassar) yang memuat sikap dan perilaku raja yang telah memerintah. Dalam laporan itu, setiap raja digambarkan dengan tiga standar penilaian, yaitu: (1) kejujuran, (2) kecakapan dan (3) keberanian. Penegakan terhadap *sirik* ini menghasilkan dampak positif pada birokrasi, berupa kemajuan kerajaan dalam hal politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan pada masa itu.

Karena itu dengan metode kualitatif penelitian ini akan mengkaji budaya *sirik* ini dengan mengambil unsur-unsur kekuatannya untuk dikembangkan dalam birokrasi moderen, khususnya dalam masalah rekrutmen dan kepemimpinan. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini birokrasi di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan mengalami krisis budaya, dimana sumberdaya manusia dan sistem dalam birokrasi terkena penyakit kolusi korupsi dan nepotisme. Penyakit tersebut sangat bertentangan dengan nilai budaya *sirik*., dan nilai-nilai rasional birokrasi.

Kata Kunci: Revitalisasi Budaya, Sirik Butta, perilaku Birokrasi, Sulawesi Selatan

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya, masalah birokrasi ini seringkali hanya dilihat dari aspek administrasi, politik dan kekuasaan. Pada hal, birokrasi ini berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi perilaku (budaya) yaitu faktor manusia yang menggerakkan, mempercepat atau memperlambat bahkan menghentikan roda birokrasi itu sendiri. Diyakini bahwa, aspek-aspek budaya yang memposisikan manusia sebagai sumber kebudayaan mempunyai relevansi yang signifikan dalam kajian masalah birokrasi, atas kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Organisasi-organisasi formal, seperti birokrasi biasanya terkontrol dengan peraturan-peraturan yang transparan, akan tetapi dibalik itu ada nilai-nilai pemihakan yang berada dalam suatu sistem berfikir yang tak dapat dikontrol oleh aturan resmi.

Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan pola pikir aktor-aktor dalam birokrasi dalam memberi tanggapan terhadap nilai-nilai objektif dan nilai-nilai subyektif dan bagaimana kedua nilai ini dimaknai dalam hubungan-hubungan kerja dalam organisasi.

2. Tujuan Khusus

Upaya memperbaiki birokrasi dengan pendekatan budaya merupakan cara yang tepat, karena krisis birokrasi diduga penyebabnya adalah kemerosotan sikap dan perilaku masyarakat. Sikap mengutamakan harga diri dan kehormatan publik dalam menjalankan tugas birokrasi telah tergeser dengan sikap yang lebih mengutamakan “harga materi”, kepentingan sesaat. Kemerosotan sikap dan perilaku seperti itu, karena tidak diberikan pendidikan kultural dalam penyiapan sumberdaya birokrasi. Pendidikan birokrasi lebih fokus pada penguasaan terkonologi, dan kompetensi, sementara mengabaikan internalisasi pengetahuan, tabiat, kebiasaan baik perilaku budaya. Untuk itu penelitian ini secara khusus bertujuan:

1. Mengkaji aspek perilaku budaya *sirik* masyarakat Sulawesi Selatan dalam Birokrasi.
2. Menginventarisasi dan menjelaskan indikator kejujuran (*lambusuk*), kecakapan (*caraddek*) dan keberanian (*barani*) sebagai perwujudan budaya *sirik*.
3. Merumuskan pendekatan dan metode dalam menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam birokrasi berbasis budaya *sirik*.

3. Pentingnya dan Keutamaan Rencana Penelitian

Praktek birokrasi Indonesia kini dalam sorotan yang tajam, karena ia dipandang sebagai bagian dari penyebab krisis multidimensi yang menciptakan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Hal mana sangat bertentangan dengan idealisme birokrasi, yaitu membangun pelayanan publik yang demokratis: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Huges (1992: 240) menegaskan :.....

Government organization are created by the public, for the public and need to accountable to it. Karena itu , birokrasi sepatutnya dijalankan oleh orang-orang yang memegang dan menegakkan nilai-nilai *accountability*, *responsibility* dan *responsiveness*, yaitu keterbukaan, tanggungjawab dan kepedulian pemihakan kepada publik (Widodo, 2001: 149) Orang-orang dalam birokrasi harus mengembangkan sikap dan perilaku *esprit de'corps*, yaitu nilai-nilai *loyalty*, (kepatuhan), *supportive* (keterbukaan) dan *trust* (kejujuran). Weber, (1964) Watak budaya seperti ini merupakan syarat birokrasi sebagai organisasi rasional, instrument kewenangan yang utama dan ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Rigg 1988: 120). Secara kultural, suku bangsa di Indonesia memiliki potensi watak budaya seperti itu, antara lain di Sulawesi Selatan dengan budaya *sirik* yang sejalan dengan watak budaya birokrasi ideal tersebut. Tetapi kenapa dalam praktek, sangat jauh berbeda dengan idealisme

birokrasi itu ? Secara teoritis, budaya birokrasi tradisional Sulawesi Selatan sejalan, dengan nilai-nilai utama birokrasi ideal, tetapi ada aspek nilai budaya lainnya yang perlu disesuaikan dengan tuntutan birokrasi kontemporer.. Misalnya kejujuran, kecakapan, dan keberanian sebagai bagian dari budaya *sirik* harus dikawal dengan netralitas dalam kekerabatan, dan komunal yaitu hubungan keluarga dan kesukuan.

Dalam kompleksitas pluralisme masyarakat aspek kekerabatan dan kesukuan yang menyatu dalam konsep komunal yang interdependen, kini berubah orientasi kedalam konsep *in-group* berhadapan dengan *out -group*. Gejala inilah yang menumbuhkan persaingan yang tidak sehat, diskriminasi dan semacamnya; diperburuk oleh kelangkaan sumberdaya kekuasaan ditengah membesarnya jumlah penduduk. Karena itu dalam penelitian ini, *sirik* sebagai nilai utama dalam budaya birokrasi di Sulawesi Selatan akan dikaji sinkronisasinya dengan aspek kelembagaan tradisional dan melihat substansi yang memelihara harmonisasi antara kelembagaan dan nilai yang diemban, status dan kedudukan dalam kekerabatan-komunitas.

Pengalaman birokrasi tradisional masa lalu dapat diangkat kembali untuk disesuaikan dalam kebutuhan birokrasi moderen. Hal ini dapat pula memperjelas pemahaman yang lebih realistis tentang konsep KKN dan langkah-langkah praktis menanggulangnya. Pengkajian kembali terhadap soal kekerabatan dan kontribusinya terhadap birokrasi tak bisa dihindari, karena dalam praktek pelayanan publik unsur kekerabatan ini sangat berpengaruh. Bahkan aspek kekerabatan ini terkadang mengikis unsur kejujuran, kecakapan dan keberanian para birokrat untuk berbuat adil, netral, dan demokratis.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Konsep

a. Revitalisasi Budaya

Revitalisasi budaya adalah upaya untuk memperkuat dan memfungsikan kembali unsur kebudayaan yang merupakan tradisi pada masa lalu. Tradisi tersebut berupa nilai yang dijadikan dasar dan acuan berperilaku dan masih dianut sekarang ini, namun tidak membumi lagi dalam praktek kehidupan seperti pada masa lalu. Unsur kebudayaan yang dimaksud adalah *sirik butta* dapat diartikan nilai martabat/harga diri/kehormatan dalam organisasi pemerintahan.

(1) *Sirik Butta*

Kata *sirik* terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar yang artinya malu. Jika kata ini berulang *sirik-sirik* berarti: segan, hormat ataupun malu-malu. Pengertian *sirik* lebih dikaitkan dengan pengertian malu dalam hal harga diri, martabat dan kehormatan, sedangkan *sirik-sirik*, malu dalam hal tindakan praktis, seperti: malu dipuji, malu diberi, dan sebagainya, kesimpulannya malu terhadap aspek yang negatif. (Munadah, 2005: 120). Abidin (1999: 143) Merumuskan defenisi *sirik* adalah sistem nilai budaya yang mengandung ajaran menjaga harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada diri manusia dengan melaksanakan hak dan kewajiban baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan,

Jika kata *sirik* dikaitkan dengan *butta* (pemerintahan) berarti upaya memelihara dan menjaga, harga diri, martabat dan kehormatan dalam pelaksanaan pemerintahan.

(2) Birokrasi

Birokrasi adalah organisasi pemerintahan yang dicirikan dengan adanya kegiatan implementasi kebijakan, bersifat rutin, spesialisasi tugas, adanya kewenangan dan jabatan sebagai fungsi dari orang yang mendapatkan legitimasi. (Chander, 1988: 169).

2. Kajian Teoritis Hubungan Perilaku Sosial dengan Perilaku Birokrasi

Dalam konsepsi masyarakat modern menurut Max Weber, birokrasi dipandang sebagai organisasi yang rasional, digunakan sebagai instrumen utama kekuasaan, tujuannya untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang dapat terukur efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas itu dapat terukur pada : (1) kegiatan Reguler birokrasi (2) tujuan dan struktur kewenangan (3) aturan terstandar (4) nilai impersonal dan rasional (5) birokrat professional (6) Administrasi efisien (Albrow, 1989, Benveniste, 1991; Drivin, 1987, Riggs, 1994, Osbourne, 1991). Sejalan dengan itu Hummel (1977: 3) memisahkan antara organisasi birokrasi dengan masyarakat (*community*), sehingga mencoba membuat batasan tentang perbedaan antara perilaku birokrasi dengan perilaku sosial. Dia berpendapat bahwa secara psikologis, tipe-tipe manusia dalam birokrasi adalah: memiliki keahlian, bersikap rasional, pengendalian tinggi terhadap emosi dan kepentingan kekerabatan yang biasanya terdapat dalam hubungan komunitas. Perilaku birokrasi dipahami oleh banyak orang bukan perilaku sosial. Dengan asumsi perilaku sosial berkaitan dengan *human relation* (hubungan

kemanusiaan-antar orang), sedang birokrasi berhubungan dengan cases (penyelesaian urusan). Sehubungan dengan ini Hummel (1977: 5) berpendapat:

Tindakan/perilaku birokrasi bukanlah perilaku sosial. Perilaku sosial sarat dengan berbagai makna yang saling berkait. Perilaku social tidak terlepas dari rangkaian makna dan konotasi, serta perasaan yang paling dalam yang harus dipahami sebagai bagian dari kerjasama atau konflik. Hal-hal seperti ini sangat tabu dalam dunia birokrasi, sebab birokrasi mengedepankan aturan (bukan makna) untuk melindungi dirinya. Jadi dunia birokrasi merupakan dunia tersendiri dari dunia sosial.

Ketegasan membedakan antara dunia birokrasi dengan dunia sosial mencegah berkembangnya sikap paradoxal dalam perilaku birokrasi akibat pertentangan antara kebiasaan komunal dengan aturan birokrasi. Birokrasi tak mengenal belas kasihan, tak merasakan cinta kasih seperti yang terjadi dalam hubungan komunal (Victor Thomson dalam Thoha, 1991: 52). Dengan demikian, keduanya tak dapat dihubungkan ataupun diadaptasikan satu sama lain.

Apabila tipe ideal Weber dijadikan sebagai standar baku pedoman penyusunan birokrasi maka berbagai kenyataan dilematis akan dihadapi. Karena unsur birokrasi dan non-birokrasi menyatu dalam sistem birokrasi. Dalam pengalaman perilaku sulit memisahkan secara tegas apa seseorang melayani orang lain betul-betul murni karena aturan dan sama sekali tidak ada kontribusi hubungan sahabat, keluarga, sama asal suku dan atau latarbelakang budaya .. Kesulitan untuk memisahkan inilah memerlukan pendekatan baru melalui perspektif budaya untuk mencoba menempatkan secara tepat. Dengan demikian persoalan birokrasi ini tidak bisa dilihat secara dikhotomi dengan komunitas. Mungkin kita menafsirkan bahwa pandangan Weber dan Hummel, maupun Thompson tersebut mencoba membantu melihat perilaku birokrasi secara spesifik dibanding dengan perilaku sosial., sehingga dapat membantu melakukan identifikasi.

Berbeda dengan pandangan Weber dan Hammel, serta Thompson, sebagai teori organisasi moderen, teori tentang budaya organisasi dapat dijadikan acuan tambahan dalam kajian birokrasi. Teori budaya melihat adanya hubungan antara aspek sosial dengan birokrasi. Simbol-simbol kekerabatan, bapak, ibu, anak, pimpinan-bawahan, senior-yunior adalah refleksi makna hubungan yang dalam, tidak saja bersifat eksklusif tetapi memperkuat jaringan eksternal diluar kekerabatan. Redlif Brown dan Morgan melihat hal seperti ini sebagai bagian dari struktur sosial, yang merujuk pada struktur resiporitas (Balandier, 1996: 65). Fenomena menunjukkan bahwa hubungan-hubungan seperti itu tidak dapat dihindari dalam birokrasi, karena birokrasi itu sendiri terdiri dari orang-orang bersama dengan segala sikap dan perilakunya tak mau pengaruh latar belakang kebudayaan dan kepribadian ikut memberi warna. Dalam realitas, terdapat perilaku social yang ditransformasikan kedalam perilaku organisasi. Dalam transformasi tersebut perhatian terhadap identitas pelaku dengan karakternya merupakan bagian utama dalam studi birokrasi, yang diperoleh melalui proses imitasi,

adaptasi maupun integrasi. Karena itu studi birokrasi pada kurun waktu tertentu tak dapat dipisahkan dari watak budaya birokrasi yang berkembang sebelumnya (Munadah, 2005: 92). Latarbelakang kebudayaan memberi pengaruh yang kuat dalam pembentukan keperibadian, baik individu maupun kelompok sehingga membedakan watak suatu komunitas atau masyarakat dengan masyarakat lain (Ralp Linton, 1945).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memadukan pendekatan teori organisasi moderen dengan pendekatan teori budaya.

3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian tentang masyarakat Sulawesi Selatan dalam perspektif budaya, dalam bentuk disertasi telah dilakukan oleh: Abu Hamid (diterbitkan hak cipta , 1994); Syekh Yusuf , Seorang Ulama Sufi dan Pejuang; Rahim diterbitkan hak cipta 1992), Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Marzuki (1995) *Sirik*, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar.

Secara umum penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa nilai budaya utama empat etnis di Sulawesi Selatan adalah *sirik* yang mempunyai relevan dengan perilaku dalam pemerintahan. *Sirik* telah membangun keperibadian orang Sulawesi Selatan untuk berjuang melawan penindasan (Abu Hamid, 1994). Jika *sirik* terinternalisasi dengan baik kedalam orang atau masyarakat, maka ia akan menciptakan pribadi yang merdeka, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia yang senantiasa didasari kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan dan semangat usaha (Rahim, 1992: 186).

Sirik bukan saja bagian dari sistem kepribadian , sistem sosial budaya, tapi juga merupakan kesadaran hokum masyarakat Bugis-Makassar. Dalam sistem nilai budaya *sirik* terdapat etika hukum yang mempersoalkan perilaku moral: baik atau buruk, benar atau salah, bajik atau jahat menurut hukum (Marzuki, 1995: 140). Walaupun penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai birokrasi, namun telah memberikan penjelasan sistem nilai budaya *sirik* yang terkait dengan birokrasi. Ada beberapa bagian penting dari penelitian tersebut yang dapat dijadikan bahan acuan, dengan kekhususan masing-masing, seperti aspek-aspek: nilai, etika hukum, sifat dan kepribadian etnis, konfigurasi kekuasaan . hal tersebut sangat penting untuk kajian budaya birokrasi.

Penelitian mengenai birokrasi di Sulawesi Selatan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun demikian pendekatan yang dipakai umumnya adalah ilmu administrasi negara dan pemerintahan, antara lain: Syukur Abdullah, 1986, Muhammad Idris dkk, 2003.

Penelitian birokrasi yang menggunakan pendekatan budaya nampaknya baru dilakukan oleh Muhlis Paeni, Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa (skripsi. 1975).

Polinggomang (tesis, 1983) , Perubahan Politik dan Hubungan kekuasaan Makassar 1906-1942. Munadah, dengan topik Perilaku Birokrasi Orang Makassar Suatu Kajian Antropologi Politik di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, (disertasi, 2005);

Hasil penelitian Mukhlis (1975), menunjukkan bahwa sistem birokrasi pada masa kerajaan tidak dapat dipisahkan dari faktor stratifikasi sosial, Kedudukan raja ditopang oleh sistem birokrasi yang berdasarkan prinsip “**golongan bawah tidak boleh memerintah golongan atas**’ ; keturunan *karaeng* (bangsawan) tidak boleh diperintah oleh golongan *tumaradeka* (golongan menengah), terlebih golongan *ata* (sahaya). Latarbelakang keturunan sangat menjadi persyaratan utama, karena klasifikasi sosial itu juga menunjukkan kepantasan menjadi pemimpin, Dengan status sebagai turunan raja maka perilakunya juga tercermin sebagai perilaku raja. Dalam pandangan yang sangat ekstrim, kenapa golongan bawah tidak boleh memerintah golongan atas, ada ungkapan *punnantu ata, ata tonji ia*; kalau berasal dari turunan sahaya maka segala perilakunya akan tercermin juga identifikasi asalnya. Dengan prinsip itu maka distribusi jabatan, sangat terkait dengan masalah keturunan menurut stratifikasi sosial tersebut, disamping kemampuan kecakapan, kejujuran dan keberanian

Penelitian Polinggomang (1982: 15) menemukan bahwa Bugis-Makassar mengenal konsep *menyatu sirik*, yang bermakna hubungan darah merupakan ikatan *sirik* antar anggota keluarga. Karena itu kekuasaan identik dengan harga diri dan martabat keluarga bangsawan yang merupakan struktur atau kelas sosial yang mendapatkan legitimasi secara otomatis untuk menjalankan pemerintahan..

Sementara itu, Penelitian Munadah telah memperkuat hasil penelitian sebelumnya, bahkan telah melakukan identifikasi terhadap nilai budaya *sirik* yang berpengaruh dalam perilaku birokrasi. Identifikasi itu memberi pemahaman yang lebih kongkrit tentang konsep *lambusuk* (jujur), *caradde* (cakap) dan *barani* (barani). Agar harga diri dan martabat (*sirik*) dapat terpelihara maka sikap jujur, cakap dan berani harus diperlihatkan dalam perilaku. Dari catatan *lontarak* ditemukan identifikasi sebagai berikut:

1. *Lambusuk* (jujur):

Dalam *lontarak* kejujuran ini dijabarkan dalam pelayanan birokrasi dengan indikator sikap dan perilaku , sebagaimana ditulis oleh Matthes (1860: 238), sebagai berikut:

Lambusuk iamintu ammassiwalappak, tamanggallepaki sook, tamak anrong paki, tamak manggepaki, tamak saribatangpaki, taniyappa asseng-assengta, taniappa tuningaita, Tania tunipakatinggita, taenatodong tunitunainta, taenatompa tunikarannuanta, taena todong tunikurisinta, taenapa tunikanakkukinta, taniappa balinta, taena todong aganta, teapaki nakuku, tea todong mamalla, tamanrannuampaki.

Artinya

Kejujuran adalah : tidak mengambil suap, tidak beribu, tidak berbak, tidak pula bersaudara, tidak punya kenalan, tidak ada orang kesukaan, tidak ada orang yang ditinggikan, tidak ada orang yang direndahkan, tidak ada yang disenangi atau dipuja, tidak ada yang benci, tidak ada lawan, tidak ada kawan, tidak gentar, tidak takut, tidak mengharapkan orang lain.

Dari uraian kalimat metafora di atas dapat disimpulkan beberapa indikator kejujuran, yaitu: (1) tidak menyukai suap -menyuap, (2) netral, (3) objektif, (4) tidak pandang bulu (5) independen, (6) mandiri.

2. *Caradde* (cakap)

Dalam kamus bahasa cakap diartikan: sanggup, mampu, pandai dan mahir. Dari pengertian ini kemudian diberi penjelasan, yaitu kemampuan dan kepandaian melakukan pekerjaan (Poerwadarminta, 1984: 179). Untuk pemahaman seperti ini dalam bahasa Makassar disebut *caradde* (Matthes, 1860: 256), yang mengandung arti: (1) *mangngasseng* (berilmu), (2) *kanawa-nawa* (inovatif), (3) *nacinika bokona* (memperhatikan asal-usulnya- rendah hati).

3. *Barani* (berani)

Pengertian berani (bahasa Indonesia) identik dengan istilah *barani* dalam bahasa Makassar yang mengandung arti: tena mallakna, tidak takut, tidak pengecut. Dalam adat-istiadat keberanian yang dimaksud harus dikaitkan dengan perbuatan yang baik yang dilandasi dengan sikap arif. Karena itu keberanian dapat diartikan tidak takut dalam kebenaran disertai cara menghindar dari kekerasan (Matthes, 1860: 256). Sikap berani indikatornya adalah (1) komit terhadap objektivitas, (2) ketegasan dalam keputusan, (3) kehati-hatian meredam nafsu (kepentingan), (4) kekuatan mencegah selera pribadi (Matthes, 1860: 258)

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan adanya potensi budaya etnik di Sulawesi Selatan, yang sangat berguna bagi pengembangan *human capacity*, dengan beberapa alasan. Pertama budaya tersebut sudah menjadi bagian yang tidak asing lagi dari kebiasaan masyarakat sampai sekarang ini. Kedua, mengandung kearifan-kearifan lokal yang mengajarkan tentang cara-cara yang lebih akomodatif dalam mengembangkan dinamika birokrasi yang harmonis. Ketiga, mendorong keberdayaan dari dalam untuk menciptakan kemandirian bagi pelayanan birokrasi yang berkelanjutan (*sustainable*) sejalan dengan otonomi daerah.

C. PENUTUP

Sulawesi Selatan dalam perspektif budaya, dalam bentuk disertasi telah dilakukan oleh: Abu Hamid (diterbitkan hak cipta, 1994); Syekh Yusuf, Seorang Ulama Sufi dan Pejuang; Rahim diterbitkan hak cipta 1992), Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Marzuki (1995) *Sirik*, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar.

Secara umum penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa nilai budaya utama empat etnis di Sulawesi Selatan adalah *sirik* yang mempunyai relevansi dengan perilaku dalam pemerintahan. *Sirik* telah membangun keperibadian orang Sulawesi

Selatan untuk berjuang melawan penindasan (Abu Hamid, 1994). Jika *sirik* terinternalisasi dengan baik kedalam orang atau masyarakat, maka ia akan menciptakan pribadi yang merdeka, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia yang senantiasa didasari kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan dan semangat usaha (Rahim, 1992: 186).

Sirik bukan saja bagian dari sistem kepribadian , sistem sosial budaya, tapi juga merupakan kesadaran hukum masyarakat Bugis-Makassar. Dalam sistem nilai budaya *sirik* terdapat etika hukum yang mempersoalkan perilaku moral: baik atau buruk, benar atau salah, bajik atau jahat menurut hukum (Marzuki, 1995: 140). Walaupun penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai birokrasi, namun telah memberikan penjelasan sistem nilai budaya *sirik* yang terkait dengan birokrasi. Ada beberapa bagian penting dari penelitian tersebut yang dapat dijadikan bahan acuan, dengan kekhususan masing-masing, seperti aspek-aspek: nilai, etika hukum, sifat dan kepribadian etnis, konfigurasi kekuasaan . hal tersebut sangat penting untuk kajian budaya birokrasi.

Barani identik dengan istilah barani dalam bahasa Makassar yang mengandung arti: tena mallakna, tidak takut, tidak pengecut. Dalam adat-istiadat keberanian yang dimaksud harus dikaitkan dengan perbuatan yang baik yang dilandasi dengan sikap arif. Karena itu keberanian dapat diartikan tidak takut dalam kebenaran disertai cara menghindari kekerasan (Matthes, 1860: 256). Sikap berani indikatornya adalah (1) komit terhadap objektivitas, (2) ketegasan dalam keputusan, (3) kehati-hatian meredam nafsu (kepentingan), (4) kekuatan mencegah selera pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zaenal, 1999. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Abu Hamid, 1994. *Syekh Yusuf Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Albrow, Martin, 1996. *Birokrasi* , Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Benveniste, GUY, 1992. *Birokrasi* , Rajawali Press, Jakarta.
- Dowse, Robert E. 1980. *Political Sociology*, John Wiley & Sons, New York.
- Hummel, Ralph P., 1977. *The Bureucratic Experience*, ST. Martin.s Press, New York.
- Linton, Ralph, 1962,. *Latar Belakang Kebudayaan daripada Kepribadian*, Djaja Sakti, Djakarta

- Marzuki. H.M. Laica, 1995. *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Matthes, B.F., 1860 *Makassaarsche Chrestomathie*, Gedrukt ED.A. Spin&Zoon, Amsterdam.
- Muh.Idris, dkk, 2003. *Penataan Birokrasi di Sulawesi Selatan, Balitbangda, Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar*
- Mukhlis, 1975. *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Zaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*, Skripsi-UGM Yogyakarta.
- Munadah, Agussalim, 2005, *Perilaku Birokrasi Orang makassar di Kabupaten Gowa, Suatu Analisis Antropologi Politik*, Unhas, Makassar
- Osborne , David dan Gaebler, Ted, 1997. *Mewirusahaakan Birokrasi* (Terjemahan), PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Polinggomang, EL. , 2002. *Makassar Abad XIX, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. KPG-Jakarta.
- Rahim, A. Rahman, 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University
- Riggs Fred W., 1991. *Administrasi Pembangunan- Sistem Administrasi dan Birokrasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1996. *Administrasi Negara-negara Berkembang (Teori Masyarakat Prismatic)* , PT. RajaGrafindo, Jakarta.